

---

## **Peran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Keberlanjutan Pendidikan Peserta Didik di SMA Darul Hikmah Mataram**

**Firman Sudaisy\***

Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

\*Corresponding Author: [sudaisyfirman@gmail.com](mailto:sudaisyfirman@gmail.com)

### **Article History**

Received : September 06<sup>th</sup>, 2024

Revised : Oktober 17<sup>th</sup>, 2024

Accepted : Oktober 25<sup>th</sup>, 2024

**Abstract:** Penelitian ini membahas tentang Peran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Keberlanjutan Pendidikan Peserta Didik di SMA Darul Hikmah Mataram. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Adapun masalah yang diteliti adalah Mekanisme pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Darul Hikmah Mataram dan Peran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Keberlanjutan Pendidikan Peserta Didik di SMA Darul Hikmah Mataram. Hasil penelitian ini menunjukkan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Darul Hikmah Mataram mendapat dukungan penuh dari seluruh warga sekolah. Guru BK/operator PIP bersama admin dan bendahara sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan program ini. Mereka memastikan pengusulan data siswa penerima PIP dilakukan dengan benar, serta mengelola dana yang cair untuk membantu siswa melunasi kekurangan biaya sekolah. PIP berperan penting dalam membantu siswa melanjutkan pendidikan dengan meringankan beban ekonomi orang tua, mencegah siswa putus sekolah, dan mengajak anak yang sebelumnya tidak bersekolah kembali mendapatkan layanan pendidikan. Program ini juga berfungsi meringankan biaya pendidikan personal bagi siswa.

**Keywords:** Keberlanjutan Pendidikan, Peran Program Indonesia Pintar.

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan upaya untuk membangun dan meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM), yang mampu menciptakan manusia produktif. Pembangunan pendidikan sangat penting karena mampu memberi kontribusi yang signifikan dalam upaya mencapai kemajuan bangsa. Oleh karena itu pendidikan sangat penting bagi manusia dan tidak boleh diabaikan dalam menghadapi dunia yang penuh persaingan. Hal ini mengacu pada pemikiran Santoso, Sarjono dan Wafroturrohman pendidikan merupakan factor penting dalam pendidikan yang mampu memberikan jalan bagi pembangunan sumber daya insane yang berkualitas sehingga mampu merubah secara cepat (Yusup et al., 2019).

Pendidikan adalah suatu bentuk interaksi manusia (Ramli, 2015). Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pendidikan menuntut terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas, cerdas, beriman, beriptek dan berakhlakul karimah sebagai tujuan dari pendidikan, maka perlu pengamatan dari segi aktualisasinya bahwa pendidikan merupakan proses interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan dari sebuah proses pendidikan.

Pada hakikatnya PIP merupakan suatu penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Permendikbud No 12 tahun 2015 menjelaskan bahwa Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan secara tunai yang diberikan kepada anak usia sekolah dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau yang memenuhi criteria sebagaimana yang ditetapkan sebelumnya yang ditandai dengan pemeberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak usia 6-12 tahun yang bersekolah maupun tidak bersekolah, atau yang berasal dari keluarga penerima KKS atau yang memenuhi criteria yang telah ditetapkan (Yusup et al., 2019).

Pemerintah mampu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melanjutkan Pendidikan Menengah (SMA/Sederajat). Instruksi Presiden No 7 tahun 2014 yaitu mengamantkan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menyalurkan dan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa-siswi yang orang tuanya kurang mampu membiayai Pendidikannya (Agusman, 2019). Upaya pemerintah memeberikan kesempatan kepada masyarakat agar bisa mendapatkan layanan Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Program tersebut diharapkan bisa membangun generasi yang unggul dan generasi muda agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan Program Pemerintah yang diterapkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa-siswi yang masih usia Sekolah namun sudah putus sekolah karena kesuitan biaya (Mauliana Sari, Sri Musdalifah, 2019).

Kartu Indonesia Pintar sangat dibutuhkan oleh siswa-siswi yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin, karena siswa-siswi yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah. Hal ini disebabkan karena keadaan perekonomian keluarga siswa-siswi yang kurang mendukung. Sehingga siswa-siswi tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih bekerja. Tujuan utama dari Program ini untuk membantu siswa-siswi yang kurang mampu agar bisa memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Dengan ditetapkannya tujuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan Pendidikan di Indonesia dan pemerataan Pendidikan yang akan berpengaruh terhadap tingkat pembangunan di Indonesia (Zahimu, 2018). Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa manfaat dari Program Indonesia Pintar ini terus dapat dirasakan oleh pelajar yang ada di Indonesia dan pada tahun 2017 sasaran Program Indonesia Pintar akan terus diperluas ke setiap daerah, bukan hanya untuk siswa yang kurang mampu, tapi juga siswa-siswi yatim piatu, agar mereka mendapat pendidikan yang layak.

## **METODE**

Adapun jenis pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif jenis deskriptif (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021). Penelitian kualitatif jenis deskriptif merupakan metode yang meneliti suatu kelompok tertentu, suatu pendekatan kualitatif jenis deskriptif hanya akan menceritakan dan memberi gambaran terkait dengan Pengembangan Pendidikan Berkelanjutan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Darul Hikmah. Data yang akan peneliti kumpulkan dalam penelitian ini sangat erat hubungannya dengan Pengembangan Pendidikan Berkelanjutan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Darul Hikmah. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata untuk memahami fenomena yang diteliti secara terinci, mendalam, dan menyeluruh dari hasil lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sekolah Menengah Atas (SMA) Darul Hikmah Mataram merupakan salah satu lembaga pendidikan umum yang bernaung di bawah Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah Mataram yang berperan untuk membentuk sumber daya pembangunan yang berada di bawah Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Barat tengah berupaya melakukan berbagai program pendidikan agar tidak tertinggal dengan kemajuan perkembangan lembaga pendidikan. Melihat pada realitas lainnya, sekolah ini menjadi sekolah pilihan untuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada saat ini. Dari keberhasilan dalam melaksanakan penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar yang dilaksanakannya. Peneliti melihat bahwa keberhasilan yang diraih tersebut tidak terlepas dari peran Kepala Sekolah dan guru-guru/ staf-staf lainnya sebagai tenaga penyaluran bantuan PIP untuk meningkatkan daya tarik peserta didik dalam menjalankan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada dukungan dari kelompok pelaksana dan kelompok sasaran. Kelompok pelaksana yang berkaitan dengan PIP adalah pemerintah pusat (dalam hal ini kemendiknas, direktorat teknis pembina pendidikan menengah) Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, sekolah dan lembaga penyalur, sementara yang dimaksud dengan kelompok sasaran adalah peserta didik yang berusia 6-21 tahun yang mempunyai KIP, peserta didik dari

keluarga Program Keluarga Harapan (PKH), ABK, dan lain-lain (Yusup et al., 2019).

Sekolah sebagai lembaga institusi sosial dalam masyarakat berusaha mendukung program PIP. Hal tersebut dibuktikan adanya kesediaan dari guru BK untuk melaksanakan tugasnya dalam menginformasikan kepada peserta didik tentang beasiswa tersebut dan mempermudah peserta didik dalam proses pencairan dana PIP (Sugiyasari, 2017). Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh bapak Khairil Anwar: “Diinformasikan bagi yang mempunyai KIP segera melapor ke sekolah, sekolah akan input data calon penerima PIP di sistem dapodik”.

Sekolah mempunyai tanggungjawab untuk mengusulkan peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu atau yang sesuai dengan kriteria penerima PIP untuk memperoleh beasiswa tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh orangtua wali peserta didik: “Bagi siswa dari keluarga yang tidak mampu non kartu itu diusulkan oleh sekolah melalui format khusus, sebenarnya mereka semua diusulkan baik yang mempunyai kartu atau yang tidak punya kartu mestinya sekolah mengusulkan jarang ada sekolah yang tidak mengusulkan karna mereka juga berharap nggak ada lagi anak-anak yang nggak mampu yang tidak sekolah” (Rachmahnia & Choiriyah, 2024). Respon orangtua dengan adanya beasiswa PIP melalui KIP sangat senang karena dana yang diterima dapat digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah dan membayar bimbingan belajar peserta didik. Orangtua mereka sangat senang ketika tahu mereka memperoleh beasiswa tersebut karena dapat meringankan biaya sekolah.

Program Indonesia Pintar bertujuan untuk membantu biaya personal peserta didik agar dapat melanjutkan pendidikan sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana tersebut diberikan melalui rekening yang langsung ditujukan ke peserta didik (Uriyalita et al., 2020). Dana yang diterima digunakan untuk membeli tas, sepatu, alat tulis dan perlengkapan sekolah lainnya. Selain untuk membeli perlengkapan sekolah, dana bantuan yang diterima peserta didik mereka gunakan untuk membayar bimbingan belajar/les tambahan di luar sekolah.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan dalam pelaksanaan kebijakan. PIP melalui KIP adalah program bantuan yang pengelolaannya tidak diserahkan kepada sekolah (Gutama et al., 2021). Program

tersebut merupakan program pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengelola PIP melalui KIP di SMA Darul Hikmah Mataram menjadi tanggungjawab guru BK/operator PIP. Dalam penelitian tentang implementasi Pendidikan Keberlanjutan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Darul Hikmah Mataram. Disini birokrasi difokuskan pada peran sekolah dan Dinas Provinsi dalam melaksanakan PIP melalui KIP serta strategi yang dilakukan untuk melaksanakan PIP agar efektif dan efisien.

### **Peran Sekolah dalam Melaksanakan PIP**

Sebagai salah satu pelaksana kebijakan, sekolah berperan dalam hal mensosialisasikan PIP kepada peserta didik. Sekolah mensosialisasikan PIP secara lisan di masing-masing kelas. Sosialisasi dilakukan oleh guru BK/operator PIP sebagai pengelola atau penanggungjawab bantuan PIP. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh ibu Ratna Wulan: “Guru BK tugasnya menyampaikan informasi ke masing-masing kelas, bagi yang mempunyai PIP segera lapor ke BK”. Sekolah juga berperan dalam hal pengusulan calon penerima PIP melalui KIP. Pengusulan dilakukan dengan mendaftarkan peserta didik yang mempunyai KIP, KPS, KKS atau sesuai dengan kriteria penerima PIP ke dalam sistem Dapodik sekolah. Dalam sistem Dapodik tersebut berisi nama peserta didik, alamat, nomor KIP, dan nama orangtua peserta didik. Admin sekolah bertugas untuk mengentri data peserta didik dalam sistem Dapodik sekolah. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Geza Ahdadi: “Ketika pengusulan calon penerima PIP, sekolah mengentri data dan nomor KPS/ Surat Keterangan tidak mampu ke dalam sistem Dapodik sekolah”. Strategi merupakan langkah yang paling efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan diadakannya PIP melalui KIP salah satunya adalah mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) akibat kesulitan ekonomi.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peran SMA Darul Hikmah Mataram dalam rangka pelaksanaan PIP melalui KIP adalah mengusulkan peserta didik, mensosialisasikan PIP, menginformasikan bahwa dana sudah dapat cair dan membuat surat keterangan kepala sekolah. Strategi yang dilakukan di SMA Darul Hikmah Mataram dalam mengimplementasikan PIP adalah mempermudah pengumpulan syarat-syarat yang

dibutuhkan untuk pengusulan dan secepatnya menginformasikan nomor rekening kepada peserta didik. Sekolah berusaha mengusulkan peserta didik yang memang layak untuk diusulkan.

### **Peran Dinas dalam Melaksanakan PIP**

Dinas Provinsi dalam pelaksanaan PIP melalui KIP tidak banyak terlibat secara langsung. Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten lebih banyak terlibat dalam pelaksanaan PIP dikarenakan untuk tahun 2015 SMA masih di bawah naungan Dinas Kabupaten/Kota Mataram. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, Dinas terlibat dalam hal sosialisasi PIP, pelayanan masyarakat terkait PIP, merekap data pengusulan PIP, dan publikasi mengenai penerima PIP dan pencairan dana.

### **Cara Sekolah Mengawasi Penggunaan Dana PIP**

Pengawasan perlu dilakukan untuk memantau arah penggunaan dana sudah tepat sasaran atau belum. Dana PIP digunakan untuk kegiatan pendidikan dan tidak diperkenankan untuk tujuan yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Pada dasarnya sekolah mengalami kesulitan terkait pertanggung jawaban penggunaan dana PIP. Hal tersebut dikarenakan dana PIP disalurkan langsung ke rekening pribadi peserta didik dan sekolah tidak mempunyai kewenangan melarang penggunaan dana PIP, sekolah hanyalah mengarahkan penggunaan dana PIP. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Ahmad Zaini selaku kepala sekolah: “Tidak ada pelaporan dana PIP karena dana tersebut murni diterima oleh siswa. Sekolah hanya bisa mengarahkan penggunaan dana” Hal tersebut diperkuat oleh bapak Khairil Anwar selaku Opertaor PIP: “Harapannya kalau PIP dikelola oleh sekolah kami bisa mengarahkan distribusi penggunaan dana. Salah satu caranya dengan mengumpulkan nota pembelian selanjutnya akan ada laporan ke Dinas Provinsi”.

Dalam petunjuk pelaksanaan PIP tidak disebutkan secara spesifik langkah yang dilakukan sekolah dalam memantau atau mengawasi penggunaan dana PIP, sehingga sekolah merasa kesulitan dalam mengawasi kesesuaian penggunaan dana PIP. Sekolah juga tidak dituntut untuk membuat laporan pertanggung jawaban terkait penggunaan dana PIP karna bantuan PIP tidak dikelola untuk sekolah. Berbeda dengan Beasiswa Siswa Miskin

(BSM) dalam hal transparansi dana, BSM mewajibkan sekolah untuk membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BSM. Laporan pertanggung jawaban tersebut berisi mengenai nota pembelian sehingga penggunaan dana BSM jelas, tetapi kendala yang dihadapi oleh sekolah dengan sistem seperti itu adalah kesulitan pengumpulan nota dikarenakan peserta didik lupa mengumpulkan nota tersebut atau nota pembelian hilang. Pengawasan PIP dilakukan secara berjenjang dimulai dari pemerintah pusat kemudian Provinsi untuk mengetahui implementasi PIP di daerah (Rohaeni & Saryono, 2018).

### **Dampak Adanya PIP Bagi Peserta Didik**

Hakikat dari suatu implementasi kebijakan adalah dampak yang dirasakan oleh kelompok sasaran sehingga permasalahan dapat terselesaikan. Tujuan dari adanya PIP melalui KIP adalah meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapat layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan ekonomi dan menarik peserta didik yang putus sekolah agar kembali mendapat layanan pendidikan di sekolah.(Herlinawati & Susanto, 2019) Besaran dana yang diberikan kepada peserta didik pendidikan menengah atas kelas X dan XI untuk satu semester sebesar Rp900.000 kelas XII untuk satu tahun sebesar Rp900.000, Dengan adanya beasiswa tersebut sangat membantu peserta didik dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti membeli tas, buku, sepatu dan perlengkapan sekolah lainnya.

### **Pembahasan**

Dalam Peran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Keberlanjutan Pendidikan Peserta Didik di SMA Darul Hikmah Mataram semua warga sekolah mendukung pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi guru BK/operator PIP melaksanakan tugasnya dalam hal menginformasikan ke peserta didik dan juga mempermudah peserta didik dalam pencairan dana PIP. Dari uraian diatas jelas bahwa guru BK/operator PIP mempunyai komitmen dan bertanggungjawab dalam melaksanakan perannya. Sekolah juga mengusulkan peserta didik yang sesuai dengan kriteria penerima PIP. Hal ini mengindikasikan sekolah paham tentang kriteria penerima PIP yang ditetapkan oleh pemerintah. Peserta didik di

SMA Darul Hikmah Mataram yang memperoleh beasiswa tersebut memanfaatkan dana PIP secara bertanggungjawab Berdasarkan hasil wawancara peserta didik menggunakan dana PIP untuk kepentingan pendidikan seperti membeli perlengkapan sekolah dan membayar bimbingan 68 beajar. Dari uraian tersebut jelas bahwa peserta didik mempunyai sikap patuh dan bertanggungjawab dalam menggunakan dana PIP.

Struktur birokrasi dalam penelitian ini dibatasi pada peran dan strategi sekolah untuk melaksanakan PIP. Pengelola PIP di tingkat sekolah diserahkan ke guru BK/operator PIP. Di SMA Darul Hikmah Mataram guru BK/operator PIP dibantu admin dan bendahara sekolah dalam melaksanakan PIP. Guru BK/operator bertugas menyampaikan informasi ke peserta didik tentang syarat yang harus dikumpulkan untuk pengusulan dan menginformasikan tentang nomor rekening penerima PIP. Admin sekolah bertugas untuk mengentri data peserta didik yang diusulkan dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Bendahara bertugas untuk mengecek peserta didik (penerima PIP) yang masih mempunyai kekurangan pembayaran sekolah, ketika dana sudah cair maka dana tersebut dapat digunakan untuk melunasi kekurangan tersebut.

Dari temuan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya kejasama antara personil pelaksana PIP dengan warga sekolah. SMA Darul Hikmah Mataram berperan dalam hal sosialisasi, pengusulan peserta didik, menginformasikan kepada peserta didik ketika dana sudah dapat diambil, dan membuat surat keterangan kepala sekolah sebagai syarat pengambilan dana. Berdasarkan data wawancara dan dokumentasi sekolah sudah melaksanakan peran tersebut. Strategi yang dilakukan oleh SMA Darul Hikmah Mataram dalam rangka mengimplementasikan PIP adalah mempermudah pengumpulan syarat-syarat yang dibutuhkan, secepatnya menginformasikan nomor rekening kepada peserta didik dan berusaha mengusulkan peserta didik yang layak untuk diusulkan. Hakikat dari implementasi adalah dampak yang ditimbulkan setelah program tersebut dinyatakan berlaku. Bila ditinjau dari tujuan PIP yang tertuang dalam petunjuk teknis PIP, maka dampak yang diharapkan adalah mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat miskin dalam memperoleh layanan pendidikan. Bila ditinjau dari penerima PIP (peserta didik)

dampak yang ditimbulkan adalah membantu peserta didik dalam membeli perlengkapan sekolah dan meringankan biaya pendidikan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian dan analisis data yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa, Peran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Keberlanjutan Peserta Didik di SMA Darul Hikmah Mataram. Dalam Peran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Keberlanjutan Peserta Didik di SMA Darul Hikmah Mataram semua warga sekolah mendukung pelaksanaan program tersebut. Dalam penelitian ini dibatasi pada peran dan strategi sekolah untuk melaksanakan PIP. Pengelola PIP di tingkat sekolah diserahkan ke guru BK/operator PIP. Di SMA Darul Hikmah Mataram guru BK/operator PIP dibantu admin dan bendahara sekolah dalam melaksanakan PIP. Guru BK/operator bertugas menyampaikan informasi ke peserta didik tentang syarat yang harus dikumpulkan untuk pengusulan dan menginformasikan tentang nomor rekening penerima PIP. Admin sekolah bertugas untuk mengentri data peserta didik yang diusulkan dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Bendahara bertugas untuk mengecek peserta didik (penerima PIP) yang masih mempunyai kekurangan pembayaran sekolah, ketika dana sudah cair maka dana tersebut dapat digunakan untuk melunasi kekurangan tersebut. Peran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Keberlanjutan Peserta Didik di SMA Darul Hikmah Mataram yaitu: 1) Membantu Peserta Didik Dalam Bersekolah, 2) Membantu Mengurangi Beban Orang Tua Peserta Didik, 3) Mencegah Peserta Didik dari Kemungkinan Putus Sekolah (Drop Out) atau tidak Melanjutkan Pendidikan Akibat Kesulitan Ekonomi, 4) Menarik Anak Usia Sekolah yang tidak Bersekolah atau Peserta Didik Putus Sekolah (Drop Out) atau tidak Melanjutkan agar Kembali Mendapatkan Layanan Pendidikan di Sekolah, 5) Meringankan Biaya Personal Pendidikan. Tidak hanya siswa-siswi saja yang merasakan manfaat dari Program Indonesia Pintar ini, tetapi juga dapat meringankan beban orang tua siswa dalam membiayai kebutuhan pendidikan anaknya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada bapak kepala sekolah dan bapak Ibu Guru serta Staf

Sekolah SMA Darul Hikmah Mataram yang sudah memberikan kami pribadi melakukan penelitian di SMA Darul Hikmah Mataram.

## REFERENSI

- Agusman, Y. (2019). Jurnal Administrasi Publik Implementasi Program Indonesia Pintar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 105–113.
- Gutama, A. S., Fedryansyah, M., & Nuriyah, E. (2021). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Berdasarkan Basis Nilai Keadilan Dalam Kebijakan Implementation of the Kartu Indonesia Pintar (KIP) Based on the Value Basis of Justice in Social Policy. *Penelitian Dan Pengabdian*, 2(3), 394.
- Herlinawati, & Susanto, A. B. (2019). Strategi Penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) Melalui Program Indonesia Pintar (PIP). *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 12(1), 65–88.
- Mauliana Sari, Sri Musdalifah, A. A. (2019). Keterampilan Manajerial Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di Madrasah Aliyah-Falah Arungkeke Kabupatenjeneponto. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 848–870. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v8i1.422>
- Rachmahnia, L., & Choiriyah, I. U. (2024). Strategi Implementasi Program Smart Indonesia. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 25(1), 1–13. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i1.1347>
- Ramli, M. (2015). Hakikat pendidikan dan peserta didik. *Tarbiyah Islamiyah*, 5(1), 61–85.
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Journal of Education*, 2(1), 1–12.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Sugiyasari, A. S. (2017). Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui Yogyakarta Implementation of Smart Indonesia Program Through Smart Card. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 6, 633–644.
- Uriyalita, F., Syahrodi, J., & Sumanta. (2020). Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) Telaah Tentang Aksesibilitas, Pencegahan dan Penanggulangan Anak Putus Sekolah di Wilayah Urban Fringe Harjamukti, Cirebon. *Edum Journal*, 3(2), 179–199. <https://doi.org/10.31943/edumjournal.v3i2.69>
- Yusup, W. B., Ismanto, B., & Wasitohadi, W. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 44–53. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2019.v6.i1.p44-53>
- Zahimu, H. (2018). Evaluasi Program Indonesia Pintar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*, 2(1), 37–46. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v2i1.469>